

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018)**

**Agus Salim**

*STIE Al-Khairiyah*

[Agus22639@gmail.com](mailto:Agus22639@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of local revenue, balance funds, and inflation on capital expenditure with economic growth as an intervening variable in the City / Regency of Banten Province. The sample from this study was 8 regencies / cities of Banten Province. which consists of Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Cilegon City, Tangerang City, Serang City, South Tangerang City. With the sampling technique using the saturated sample method. This data is obtained from the website of the Director General of Financial Balance of Regional Governments through [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) and BPS of the Banten Provincial Government. The data in this study were processed using SPSS software. The results of this study conclude that the regional original income variable has a positive effect on economic growth, balancing funds have a positive effect on economic growth, inflation has a negative effect on economic growth, regional original income has a positive effect on Capital Expenditure, positive influential balancing funds adapts the realization of capital expenditure, Inflation has a negative effect on capital expenditure realization, economic growth has a positive effect on capital expenditure realization, regional original income has a positive effect on capital expenditure realization mediated by economic growth, balancing funds have a positive effect on capital expenditure realization mediated by economic growth, and inflation has a positive effect on realization of capital expenditure is mediated by economic growth.*

**Keywords** : ***Regional Original Income, Balancing Funds, Inflation, Capital Expenditures, Economic Growth.***

**PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output. Tuntutan dalam merubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2008). Pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk menambah aset tetap. Realisasi Belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif. Provinsi Banten merupakan daerah yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga seluruh kabupaten dan kota diharapkan telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan seluruh kabupaten dan kota. Sesuai dengan visi yang diembannya yaitu bersatu mewujudkan rakyat banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pendapatan asli daerah di Provinsi Banten pada Tahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan namun tidak

memberikan kontribusi terhadap realisasi belanja modal. Namun dengan berlakunya undang-undang no 23 tahun 2014 Tentang perubahan ekonomi dari sejak otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi keuangannya terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan tingkat inflasi dengan harapan dapat memenuhi pembiayaan belanja daerah terutama dalam pengalokasian belanja modal pada Provinsi Banten, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Namun selama 4 tahun terakhir belanja modal mengalami penurunan hal ini dapat dijelaskan dari data belanja modal menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2015 dan mengalami penurunan pada Tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan pada Tahun 2015 belanja modal mengalami peningkatan akibat timbulnya perkembangan industri petrokimia dan pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2015 mengambil alih proyek prioritas. ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) (2015-2018))

Banyaknya Penelitian yang sudah mengkaji atau melakukan penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja modal namun beberapa hal penelitian terdahulu masih belum konsisten dan belum memuaskan sehingga menimbulkan *research gap*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan inflasi terhadap Realisasi Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Motivasi penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Realisasi Belanja modal dalam kemandiraian Provinsi Banten.

## **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi (Agency Theory)**

Teori ini menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Lane (2003), teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal serupa dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*).

Kemudian dapat disimpulkan menjadi, Principal (masyarakat) akan menitipkan keuangannya yang berupa pembayaran pajak kepada pihak agent (pemerintah) yang mengelola keuangan yang dititipkan masyarakat untuk pembangunan dan lain sebagainya untuk kepentingan publik (masyarakat). Di sisi lain penyesuaian organisasi publik dalam teori agensi terjadi dalam pendapatan asli daerah dimana masyarakat membayar pajak daerah, dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pengembangan suatu daerah, inflas, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dimana pemerintah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tersebut.

### **Kajian Teoritis**

Pengalokasian dana dalam bentuk realisasi belanja modal dalam APBD bertujuan untuk menambah aset tetap. Realisasi Belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah mengubah komposisi belanjanya diharapkan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif.

Pergeseran komposisi belanja untuk sektor-sektor produktif merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi tingkat investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto, 2007).

### **Realisasi Belanja Modal**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL  
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018)**

Realisasi Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2009) adalah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah/ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Dana Perimbangan memiliki pengertian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar Belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, ketimpangan horizontal serta guna mencapai standar pelayanan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menghasilkan kebutuhan belanjanya. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil (Noor, 2009).

### **Inflasi**

Dalam pengertian Inflasi secara umum adalah sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Nopirin (2007) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu. Sementara Samuelson dan Nordhaus (2008) berpendapat bahwa inflasi adalah sebagai kenaikan harga secara umum yang dinyatakan *Rate of inflation (year t)* berasal dari selisih *price level year t* dengan *price level year t-1* dibagi *price level year t-1*.

### **Konsep Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*)**

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya (Sukirno, 1994).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi**

Saragih (2003) peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan penelitian oleh Tambunan (2006) yang menyatakan Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal.**

#### **Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Azzumar (2011) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi (Chindy *et. al*, 2016) Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan oleh Ristriardani (2011) menemukan bahwa DAU, DBH dan DBH PU mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pendapatan perkapita. Sedangkan, DAK menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita. Hasil penelitian lainnya adalah terdapat disparitas pendapatan perkapita antar daerah. DBH dan DBH PU mendorong terjadinya tingkat disparitas yang tinggi, namun DAU (yang mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan) mampu mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar daerah tersebut.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi**

#### **Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Adanya pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan, yaitu jika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun dan jika inflasi menurun maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izzah (2015). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh semua masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968-2012 adalah berkorelasi negatif sebesar 4,3%.

Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013) inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  
Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal**

Didik (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. Menurut Arbie (2013) menyatakan secara parsial bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Oktaviani *et al*. (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja

modal. Menurut Arry et al (2015) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal karena kurangnya dalam menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan baru yang dapat di manfaatkan secara berkelanjutan. Sri (2018) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mardiasmo (2009) adalah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah/ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari pendapat diatas yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil pajak dan bukan pajak.

Realisasi belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berdasarkan uraian diatas pendapatan asli daerah mampu mengoptimalkan komponen yang mempengaruhi pendapatan asli daerah maka realisasi belanja modal akan berdampak kepada kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal**

#### **Dana Perimbangan dan Belanja Modal**

Arbie (2013) menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DAK terhadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel DBH terhadap Belanja Modal. Menurut Arry (2015) menyatakan Variabel Dana Alokasi Umum dalam pengujian ini memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel Dana Alokasi Khusus dalam pengujian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Menurut Masayu *et al* (2017) terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja modal. Menurut Ambarita (2010) menyatakan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Menurut Sari *et al* (2014) menyatakan hal yang sama bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Dana Perimbangan memiliki pengertian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar Belakang lain adanya transfer dana dana dari pusat ke daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, ketimpangan horizontal serta guna mencapai standar pelayanan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menghasilkan kebutuhan belanjanya. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi hasil (Noor, 2009).

Menurut Henley *et al* (Mardiasmo, 2002) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*Promote accountability*)
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah, yaitu pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Realisasi belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berdasarkan uraian diatas dana perimbangan jika di pakai sesuai peruntukannya didalam realisasi belanja modal akan berdampak baik kepada kemajuan suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal.**

### **Inflasi dan Belanja Modal**

David *et al* (1977) menyatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi belanja modal Menurut Ndari *et al* (2012) Menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Nopirin (2007) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu. Sementara Samuelson dan Nordhaus (2008) berpendapat bahwa inflasi adalah sebagai kenaikan harga secara umum yang dinyatakan *Rate of inflation (year t)* berasal dari selisih *price level year t* dengan *price level year t-1* dibagi *price level year t-1*.

Prathama dan Mandala (2005) berpendapat bahwa terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi adalah sebagai berikut ini.

1) Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.

2) Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut menyebabkan harga secara umum naik.

3) Berlangsung terus menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Realisasi Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berdasarkan uraian diatas inflasi merupakan suatu komponen dalam realisasi belanja modal sehingga jika inflasi tinggi akan mempengaruhi realisasi belanja modal di suatu daerah.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> : Pengaruh inflasi terhadap Realisasi Belanja Modal**

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal**

Yovita (2009) menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Taiwo *et al* (2011) menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Namun menurut Adiwiyana (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB atas harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sukirno (2006:9-10) juga mengatakan bahwa pertumbuhan

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL  
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018)**

ekonomi sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan ekonomi merupakan suatu komponen dalam realisasi belanja modal sehingga jika pertumbuhan tinggi akan mempengaruhi realisasi belanja modal di suatu daerah.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>7</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal**

### **Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal**

Yovita (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Zuwesty (2015) menyatkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi pengaruh PAD terhadap belanja Modal semakin besar. Arbie (2013) menyatakan pengaruh PAD terhadap belanja modal semakin kuat dengan dimediasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Taiwo et al (2011) menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008).

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>8</sub> : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi**

### **Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal**

Masayu *et al* (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi. Ambarita (2010) meyakini bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi. Sari *et al* (2014) menyatakan hal yang sama bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>9</sub> : Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi**

### **Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal**

Menurut David *et al* (1977) menyatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lubis (2014) bahwa Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968-2012 adalah berkorelasi negatif sebesar 4,3%.

David *et al* (1977) menyatakan bahwa tingkat inflasi akan mempengaruhi belanja modal Menurut Ndari *et al* (2012) Menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Nopirin (2007) inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu. Sementara Samuelson dan Nordhaus (2008) berpendapat bahwa inflasi adalah sebagai kenaikan harga secara umum yang dinyatakan *Rate of inflation (year t)* berasal dari selisih *price level year t* dengan *price level year t-1* dibagi *price level year t-1*.

Prathama dan Mandala (2005) berpendapat bahwa terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi adalah sebagai berikut ini.

4) Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.

5) Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut menyebabkan harga secara umum naik.

6) Berlangsung terus menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Adanya pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan, yaitu jika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun dan jika inflasi menurun maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izzah (2015). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh semua masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2014). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968-2012 adalah berkorelasi negatif sebesar 4,3%.

Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013) inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Realisasi Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Realisasi Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).

Berdasarkan Uraian tersebut di atas maka Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>10</sub> : Pengaruh inflasi terhadap belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi**

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, periode 2015–2018 dengan jumlah sampel sebanyak 8 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan. Sumber: [www.Djpk.depkeu.go.id](http://www.Djpk.depkeu.go.id).

### Metode Analisis Data



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL  
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018)**

Dalam metode analisa data, penelitian ini menggunakan metode analisa data multivariate, yang merupakan penelitian dengan metode statistik deskriptif dan inferensial yang digunakan untuk menganalisa data lebih dari dua variabel penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Asumsi Klasik OLS (*Ordinary Least Square*)**

Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut *Ordinary Least Square* (pangkat kuadrat terkecil). Metode OLS ini adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2006).

Dalam pengujian hipotetis dengan analisis regresi harus terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik. Uji tersebut meliputi:

#### **Uji Normalitas**

Bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak, maka dapat dilihat melalui *normal probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila Distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006).

Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji analisis statistik Parametrik dengan grafik Histogram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk gambar normal dan sempurna ( semestris) sehingga data ini terdistribusi normal.

#### **Uji Multikolinieritas**

Dalam pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho,2005). Selain itu uji Multikolinieritas juga bertujuan untuk mendeteksi terhadap terjadinya multikolinieritas yang bertujuan menghindari pembiasan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan itu yaitu pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilai *Variance inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut terbebas dari multikolinieritas.  $VIF=1/Tolerance$ , Jika  $VIF=10$  maka  $Tolerance=0,1$  (Ghozali,2006)

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF Kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel dalam model regresi tersebut.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,2006:105). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan varian residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau heterokedastisitas. Dalam menentukannya ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot model tersebut dengan melakukan uji glesjer (Ghozali,2006:105).

Hasil uji heteroskedastisitas ini menunjukkan grafik scattter plots terlihat bahwa titik titik menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dari gambar grafik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan.

### Uji Autokorelasi

Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya) (Ghozali,2006:95). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya. Pengujian ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (*Durbin Watson Test*), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan cara menghitung nilai  $d$  statistik. Dalam pengujian ini menggunakan asumsi apabila nilai Durbin Watson berada diantara  $-2$  sampai dengan  $+2$  berarti tidak terdapat autokorelasi.

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa nilai DW pada tahap 1 dan 2 sebesar 1,931 dan 2,365 hal ini menunjukkan bahwa model kedua terbebas dari autokorelasi, karena DW berada diantara  $-2$  sampai  $+2$  dan nilai  $DW > dU$  ( $2,365 > 1,8187$ ) dengan jumlah sampel 32 dan  $n$  ( $k=5$ ) dan tingkat signifikansi 0,05 (5%).

### Uji Korelasi

Pengujian Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara beberapa variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain uji korelasi tidak membedakan antara variabel Dependen dengan variabel Independen (Ghozali,2006).

Berdasarkan hasil output diatas tampak bahwa terdapat korelasi atau hubungan pertumbuhan ekonomi dengan variabel PAD 4,8% sementara Dana Perimbangan paling tinggi yaitu 16,5% dan Inflasi sebesar 7,2% hal ini menunjukkan ada hubungan korelasi dengan ditunjukkan bahwa korelasi dibawah 95%, maka dari keterangan data diatas dapat diambil kesimpulan terdapat korelasi.

Berdasarkan hasil output diatas tampak bahwa terdapat korelasi atau hubungan Realisasi Belanja Modal dengan variabel PAD paling tinggi 53,9% sementara Dana Perimbangan paling yaitu 11,7%, Inflasi sebesar 0,2% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 41,6% hal ini menunjukkan ada hubungan korelasi dengan ditunjukkan bahwa korelasi dibawah 95%, maka dari keterangan data diatas dapat diambil kesimpulan dapat dikatakan terdapat korelasi .

### Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel Dependen Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel Independen dalam menjelaskan variasi variabel Dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Dependen (Ghozali,2006).

Pada tabel menunjukkan koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R Square sebesar 0,62 hal ini berarti 6,2% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Inflasi. Sementara sisanya ( $100\% - 6,2\% = 93,8\%$ ) dijelaskan oleh sebab yang di luar variabel tersebut.

Pada tabel menunjukkan koefisien determinasi yang dilihat dari adjusted R Square sebesar 0,394 hal ini berarti 39,4 % Realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu PAD, Dana Perimbangan, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Sementara sisanya ( $100\% - 39,4\% = 60,6\%$ ) dijelaskan oleh sebab yang diluar variabel tersebut.

### Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression*) bertujuan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali,2006:7).

Dari model penelitian tahap 1 dan 2 ini dapat disimpulkan secara bersama sama signifikan karena  $p\text{-value} = 0,001$  lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ )

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Keterangan	Model 1		Model 2	
	B	Sig.	B	Sig.
Pad (x1)	0,077	0,040	0,556	0,001
Daper (x2)	0,188	0,030	0,153	0,031
Inflasi (x3)	0,086	0,047	-0,072	0,047
Pertumbuhan ekonomi (z)			0,369	0,015

Hasil Pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini adalah untuk menguji apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0,077 dengan tingkat signifikan sebesar 0,040 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis pertama berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zuwesty (2015) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Tambunan (2006) yang menyatakan Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi daerah. PAD merupakan pendapatan Asli daerah yang bersumber dari pendapatan internal suatu daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada desentralisasi daerah. PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi yang artinya dengan adanya kenaikan PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demikian juga apabila terjadi berkurangnya Pendapatan Asli daerah yg diterima akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan berkurang.

Hasil Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi banten. Hasil penelitian menunjukkan nilai  $\beta_1$  sebesar 0,188 dengan tingkat signifikan sebesar 0,030 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kedua berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa *dana perimbangan* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi . Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Azzumar (2011) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan merupakan dana pemerintah yang dialokasikan ke daerah untuk menjamin kelangsungan transfer fiskal ke daerah yang hal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bagi pemerintah daerah perlu memaksimalkan penggunaan transfer ini dengan melihat skala prioritas pembangunan sehingga tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel inflasi memberikan nilai  $\beta_1$  0,086 dengan tingkat signifikan sebesar 0,047 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis ketigaberhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Izzah (2015). bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Lubis (2014). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Korelasi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam tahun 1968-2012 adalah berkorelasi negatif sebesar 4,3%. Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al* (2013) inflasi yang terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi ini diawali Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan dengan adanya Inflasi ini maka desakan biaya,

mengakibatkan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. hingga dengan kenaikan gaji ini merupakan peningkatan PDRB suatu daerah yang otomatis meningkatkan Pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah PAD berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel PAD memberikan nilai  $\beta_1$  0,556 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis keempat berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Didik (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arbie (2013) menyatakan secara parsial bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Oktaviani et al. (2015) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut Arry et al (2015) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal karena kurangnya dalam menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan baru yang dapat di manfaatkan secara berkelanjutan. Sri (2018) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki merupakan Kemampuan daerah yang berbeda-beda membuat disetiap daerah yang nantinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang maksimal serta pemerataan dan keadilan dalam bentuk belanja modal Anggaran Belanja terutama belanja modal dipandang penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Belanja Modal merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Pendapatan daerah dan Belanja Modal saling mempengaruhi.

Hasil pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah daper berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel daper memberikan nilai  $\beta_1$  0,153 dengan tingkat signifikan sebesar 0,031 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kelima berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Menurut Masayu et al (2017) terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap belanja modal. Menurut Ambarita (2010) menyatakan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Menurut Sari et al (2014) menyatakan hal yang sama bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kemampuan daerah dalam hal memenuhi kebutuhan daerahnya dalam keadaan yang berbeda-beda sehingga membuat pemerintah pusat memberikan transfer berupa Dana Perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Transfer tersebut diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan disetiap daerah yang nantinya dapat dialokasikan untuk kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang maksimal serta pemerataan dan keadilan dalam bentuk belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel inflasi memberikan nilai  $\beta_1$  -0,072 dengan tingkat signifikan sebesar 0,047 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis keenam berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negative terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ndari et al (2012) Menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Inflasi merupakan kondisi daerah menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Sedangkan dengan adanya Inflasi ini maka desakan biaya, mengakibatkan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Dengan gaji lebih tinggi ini akan mengakibatkan konsumtif, sehingga harga akan naik. Pemerintah dengan banyaknya pengangguran berupaya untuk memenuhi dengan meningkatkan belanja modal tetapi kenyataan tidak bahwa perintah untuk mengatasi harga yg tidak menentu maka melakukan operasi pasar agar harga tidak mengganggu

tingkat kemampuan hidup masyarakat suatu daerah. Hal ini lah inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel Pertumbuhan ekonomi memberikan nilai  $\beta_1$  0,369 dengan tingkat signifikan sebesar 0,015 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis ketigaberhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yovita (2009) menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taiwo *et al* (2011) menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Namun menurut Adiwiyana (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Belanja modal memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang sifatnya tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industry, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa

Hasil pengujian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah PAD berpengaruh terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel PAD berpengaruh langsung dengan nilai  $\beta_1$  0,556 dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,028 dengan total  $\beta_1$  0,584 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kedelapan berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yovita (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Zuwesty (2015) menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi pengaruh PAD terhadap belanja Modal semakin besar. Arbie (2013) menyatakan pengaruh PAD terhadap belanja modal semakin kuat dengan dimediasi pertumbuhan ekonomi. Menurut Taiwo *et al* (2011) menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat PAD pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap realisasi belanja modal di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel daper berpengaruh langsung dengan nilai  $\beta_1$  0,153 dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,069 dengan total  $\beta_1$  0,222 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kesembilan berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Masayu *et al* (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi. Ambarita (2010) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi. Sari *et al* (2014) menyatakan hal yang sama bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

dan akan semakin kuat dengan adanya variabel pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, Dana perimbangan merupakan dana pemerintah yang dialokasikan ke daerah untuk menjamin kelangsungan transfer fiskal ke daerah yang hal ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal dan bertambahnya sektor jasa, dalam alokasi belanja modal.

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah inflasi berpengaruh terhadap realisasi belanja modal di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara individu variabel inflasi berpengaruh langsung dengan nilai  $\beta_1$  -0,072 dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,031 dengan total  $\beta_1$  -0,041 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 berada lebih rendah pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kesepuluh berhasil menolak  $H_0$ . Berarti dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ndari *et al* (2012) Menyatakan inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kondisi pemerintah dalam pengelolaan daerah Inflasi merupakan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Dengan adanya Inflasi ini maka desakan biaya mengakibatkan tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Dengan gaji lebih tinggi ini akan mengakibatkan konsumtif, sehingga harga akan naik. Pemerintah dengan banyaknya pengangguran berupaya untuk memenuhinya dengan meningkatkan belanja modal tetapi kenyataan tidak bahwa perintah untuk mengatasi harga yang tidak menentu maka melakukan operasi pasar agar harga tidak mengganggu tingkat kemampuan hidup masyarakat suatau daerah. Karena hal ini inflasi berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini dilakukan diProvinsi Banten dengan populasi 8 kabupaten dan kota yang ada diprovinsi Banten periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2018 pemilihan sampel dilakukan secara jenuh yaitu sampel penelitian diambil secara keseluruhan. Dari hasil analisis data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Brata (2004), Zuwesti( 2015) dan Tambunan (2006). Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Azzumar (2011), Chindy *et. al*, (2016). Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian Izzah (2015). Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif terhadap Realisasi Belanja Modal. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Didik (2015), Arbie (2013) dan Oktaviani *et al*. (2015). Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Masayu *et al* (2017) , Ambarita (2010) dan Sari *et al*. (2014). Inflasi berpengaruh negative terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ndari *et al* (2012). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2009) . Pendaptan asli daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Taiwo *et al* (2011). Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al* (2014). Inflasi berpengaruh negative terhadap realisasi belanja modal di mediasi oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ndari *et al* (2012).

Penelitian ini memiliki keterbatasan adalah Keterbatasan waktu penelitian membuat terbatasnya jumlah sehingga penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Provinsi Banten sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke seluruh Pemerintah Daerah di indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan Lima Variabel, yaitu variabel ralisasi belanja modal , Pendaptan Asli daerah , Dana perimbangan, Inflasi, dan Pertumbuhan ekonomi. Sehingga Objek penelitian terbatas pada

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN INFLASI TERHADAP BELANJA MODAL  
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten untuk periode Tahun 2015-2018)**

rentang waktu hanya 4 (tahun). Penelitian menggunakan data satu provinsi saja yang terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan berbagai provinsi lainnya.

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran untuk penltian selanjutnyantuk Memperbesar jumlah sampel dan memperluas populasi penelitian. Populasi penelitian tidak hanya diambil dari kabupaten/kota Provinsi Banten saja, mungkin bisa dikembangkan pada kabupaten/kota Provinsi di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan variabel yang lebih kompleks dengan permasalahan yang lebih menarik dan terbaru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardani Rezka Prakorso., 2008. Analisis Pengaruh penerimaan pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir. *Journal Management Accounting Research* 147–166.
- Arbie Gugus Wandira., 2013. Pengaruh Pendaptan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengelokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1)
- Rachmawati Meita Oktaviani., Erdi Adyatma., 2015. Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2015, Hlm: 190 – 205 vol.4 no 2
- Devi mustika supriyan., 2014. Analisis faktor – faktor yang berpengaruh Terhadap alokasi belanja daerah pada pada kabupaten/kota provinsi wilayah pulau Sulawesi .
- Didik purwanto., 2015. Analiis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum , produk domestic rasional bruto tehadap realosasi belanja modal. *Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi* vol. 11 No 2 september 2015:263-271.
- Anita lestari,Nasrullah Dali ,Muntu Abdullah., 2016. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan daerah provinsi Sulawesi tenggara . *jurnal progres ekonomi pembangunan* volume 1, Nomor 2
- Zuwesty eka putri., 2015 analisis pengaruh pendapat asli daerah (pad) , dana alokasi umum (dau) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten/kota provinsimjawa tengah . *jurnal bisnis dan manajemen* vol.55, No.2
- Dessy diah pratama, sri ayem ., 2018 pengaruh pertumbuhan ekonomi , dana alokasi umum , dana alokasi khusus dan pndapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi daerah istimewa yogyakarta periode 2011-2016 *akuntansi dewantara* vol. 2 no. 2.
- Ardani, reza prakors , joko setiawan , Rida prawita sari . 2008 analisis pengaruh penerimaan pajak belanja pembangunan/modal dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga decade terakhir
- Badan pusat statistik, statistik keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi banten 2014-2017
- Gozali , imam *aplikasi analisis multivariate dengan program spss* . cetakan iv . badan badan penerbit dari universitas diponegoron. Semarang 2006 .
- Departemen republic Indonesia , tentang perimbangan keuangan Jakarta 2005.

Kepmendagri no.29 tahun 2002 tentang belanja modal

Mardiasmo . *otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Edisi III . penerbit andi. Yogyakarta 2009

Halim Abdul. 2007. Akuntansi sektor public : akuntansi keuangan daerah edisi 3. Yogyakarta : salemba empat

Nugroho , bhuono ,agung .*startegi jitu mrmilih metode statistik penelitian dengan SPSS* .Edisi 1. Penerbit andi Yogyakarta 2005.

Peraturan pemerinrah republik Indonesia no.24 tahun 2005 tentang belanja modal.

Peraturan republik Indonesia no.71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintah.

Sugiyono . metode penelitian bisnis . cetakan kesepuluh . CV alfabeta. Bandung 2007

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 perubahan dari undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang no.23 tahun2004 perubahan dari undang undang no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

[www.dipk.depkeu.go.id](http://www.dipk.depkeu.go.id)

[www.bps.Banten.go.id](http://www.bps.Banten.go.id)